

LAPORAN KEUANGAN

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN SLEMAN**
Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2023



**Jl. Candisari No. 14
Beran, Tridadi, Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta 55511**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Narkotika Nasional yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sleman, 22 Januari 2024

Kepala,



Siti Alfiah, S.Psi., S.H., M.H.

NRP. 67050016

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	15
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	20
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	25
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	31
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	33
Lampiran	



BNNK SLEMAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Sleman, D.I. Yogyakarta 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

Email: bnnkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sleman, 22 Januari 2024

Kepala,



Siti Alfiah, S.Psi., S.H., M.H.

NRP. 67050016

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp61.770.000 atau mencapai 104,93 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp58.870.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp1.834.248.359 atau mencapai 99,84 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.837.211.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp162.149.197 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp26.499.170; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp135.650.027; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp8.942.557 dan Rp153.205.640.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp61.770.000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp1.935.069.009 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp1.873.299.009. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp1.873.299.009.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp254.026.290 ditambah Defisit-LO sebesar Rp1.873.299.009 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp1.772.478.359 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp153.205.640.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi

Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TH 2023				TH 2022
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN	%	REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	58.870.000	61.770.000	2.900.000	104,93	18.310.000
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		58.870.000	61.770.000	2.900.000	104,93	18.310.000
BELANJA	B.2					
Belanja Barang	B.3	1.808.124.000	1.805.220.609	(2.903.391)	99,84	1.579.862.732
Belanja Modal	B.4	29.087.000	29.027.750	(59.250)	99,80	69.579.000
JUMLAH BELANJA		1.837.211.000	1.834.248.359	(2.962.641)	99,84	1.649.441.732

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA**BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TH 2023	TH 2022
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	0	0
Persediaan	C.1.4	26.499.170	19.355.340
JUMLAH ASET LANCAR		26.499.170	19.355.340
ASET TETAP	C.2		
Peralatan dan Mesin	C.2.1	1.662.252.117	1.633.224.367
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.2	(1.526.602.090)	(1.390.094.346)
JUMLAH ASET TETAP		135.650.027	243.130.021
JUMLAH ASET		162.149.197	262.485.361
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.3		
Uang Muka dari KPPN	C.3.1	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga	C.3.2	8.943.557	8.459.071
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		8.943.557	8.459.071
JUMLAH KEWAJIBAN		8.943.557	8.459.071
EKUITAS			
Ekuitas	C.4	153.205.640	254.026.290
JUMLAH EKUITAS		153.205.640	254.026.290
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		162.149.197	262.485.361

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TH 2023	TH 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	61.770.000	14.210.000
JUMLAH PENDAPATAN		61.770.000	14.210.000
BEBAN			
Beban Persediaan	D.2	88.878.170	75.381.650
Beban Barang dan Jasa	D.3	1.269.578.842	1.125.064.171
Beban Pemeliharaan	D.4	151.519.253	152.482.418
Beban Perjalanan Dinas	D.5	288.585.000	242.665.041
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.6	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	136.507.744	193.306.751
JUMLAH BEBAN		1.935.069.009	1.788.900.031
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.873.299.009)	(1.774.690.031)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	0	4.100.000
Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar		0	4.100.000
Beban Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	4.100.000
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(1.873.299.009)	(1.770.590.031)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa	D.9	0	0
Beban Luar Biasa		0	0
JUMLAH POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS (DEFISIT) LO		(1.873.299.009)	(1.770.590.031)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TH 2023	TH 2022
EKUITAS AWAL	E.1	254.026.290	387.332.109
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1.873.299.009)	(1.770.590.031)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
Penyesuaian Nilai aset	E.4.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.4.4	0	0
Koreksi Lain-lain	E.4.5	0	0
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		0	0
EKUITAS			
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	1.772.478.359	1.637.284.212
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(100.820.650)	(133.305.819)
EKUITAS AKHIR	E.6	153.205.640	254.026.290

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman (BNN Kabupaten Sleman) merupakan instansi vertikal yang dibentuk sebagai salah satu upaya pemerintah dalam rangka menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)) di daerah, khususnya dalam hal ini adalah di wilayah Kabupaten Sleman. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman berkantor di Jalan Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman yang memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Sleman akan bahaya penyalahgunaan narkoba sehingga masyarakat bisa turut serta menanggulangi segala permasalahan yang timbul akibat masalah tersebut.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman berkomitmen dengan visi ***“menjadi lembaga yang profesional, tangguh, dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”***. Untuk mewujudkan visi di atas, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat Sleman terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat Sleman dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
3. Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sleman;
4. Meningkatkan kualitas kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
5. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalahguna dan/atau pecandu narkoba baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman. Laporan Keuangan

ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pererintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang

ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

- c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tata Cara Penyusutan Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penjelasan atas Pos
Laporan Realisasi
Anggaran*

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.837.211.000. Selama tahun 2023, dilakukan revisi atas DIPA Awal Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman yang disebabkan adanya adanya revisi penambahan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penambahan anggaran belanja modal dari eselon I, dan penyesuaian dengan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan program kegiatan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNBP	8.700.000	58.870.000
Jumlah Pendapatan	8.700.000	58.870.000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	1.777.075.000	1.808.124.000
Belanja Modal	0	29.087.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	1.777.075.000	1.837.211.000

*Realisasi Pendapatan
Rp61.770.000*

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp61.770.000 atau mencapai 104,93 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp58.870.000. Pendapatan Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman terdiri dari Pendapatan Jasa Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	-
Pendapatan Jasa Lainnya	58.870.000	61.770.000	104,93
Jumlah	58.870.000	61.770.000	104,93

Pendapatan Jasa Lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari layanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba (SKHPN) bagi masyarakat umum di luar layanan rehabilitasi sebesar Rp61.770.000.

Realisasi Pendapatan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 237,36 persen dibandingkan TA 2022 karena meningkatnya minat masyarakat yang mengakses layanan di Klinik Sembada Bersinar Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman untuk keperluan melamar pekerjaan sehubungan dengan adanya penerimaan CPNS dan PPPK. Selain itu juga terdapat penerimaan siswa pada sekolah dan mahasiswa pada perguruan tinggi yang menyaratkan SKHPN. Klinik Sembada Bersinar Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman kini lebih dikenal oleh masyarakat dibandingkan pada saat awal klinik beroperasi. Di samping itu, pada TA 2022 terdapat penundaan pengajuan revisi target PNBPN oleh Eselon I dalam waktu yang relatif lama sehingga menghambat pelayanan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman kepada masyarakat yang membutuhkan SKHPN, mengingat jumlah *drug abuse test kit* yang dimiliki terbatas dan *stock* telah habis.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	4.100.000	-
Pendapatan Jasa Lainnya	61.770.000	14.210.000	334,69
Jumlah	61.770.000	18.310.000	237,36

Realisasi Belanja
Rp1.834.248.359

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2023 adalah sebesar Rp1.834.248.359 atau 99,84% dari anggaran belanja

sebesar Rp1.837.211.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	1.808.124.000	1.805.220.609	99,84
Belanja Modal	29.087.000	29.027.750	99,80
Total Belanja Kotor	1.837.211.000	1.834.248.359	99,84
Pengembalian Belanja		0	
Jumlah	1.837.211.000	1.834.248.359	99,84

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 11,20 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan meningkatnya Belanja Barang.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang	1.805.220.609	1.579.862.732	14,26
Belanja Modal	29.027.750	69.579.000	(58,28)
Jumlah	1.834.248.359	1.649.441.732	11,20

Belanja Barang
Rp1.805.220.609

B.3. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.805.220.609 dan Rp1.579.862.732. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan 14,26 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Kenaikan Belanja Barang Operasional berupa belanja keperluan perkantoran, belanja honor operasional satuan kerja, dan belanja barang operasional lainnya.
2. Kenaikan Belanja Barang Non Operasional berupa belanja bahan dan belanja honor output kegiatan.
3. Kenaikan Belanja Barang Persediaan akibat meningkatnya target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mempengaruhi pagu dan realisasi belanja barang persediaan (*drug abuse test kit*).
4. Kenaikan Belanja Jasa berupa belanja langganan listrik, belanja langganan air, belanja langganan daya dan jasa

lainnya (terdapat upgrade kecepatan internet), belanja jasa profesi, dan belanja jasa lainnya.

5. Kenaikan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri berupa belanja perjalanan dinas biasa.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	718.113.489	653.524.056	9,88
Belanja Barang Non Operasional	172.815.500	141.567.900	22,07
Belanja Barang Persediaan	96.022.000	65.443.040	46,73
Belanja Jasa	378.165.367	324.180.277	16,65
Belanja Pemeliharaan	151.519.253	152.482.418	(0,63)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	288.585.000	242.665.041	18,92
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	1.805.220.609	1.579.862.732	14,26
Pengembalian Belanja Barang	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Barang	1.805.220.609	1.579.862.732	14,26

*Belanja Modal
Rp29.027.750*

B.4. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp29.027.750 dan Rp69.579.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar 58,28 persen dibandingkan TA 2022 disebabkan karena pagu belanja modal TA 2023 mengalami penurunan sebesar 58,39% dibandingkan pagu belanja modal TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.027.750	69.579.000	(58,28)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	-
Belanja Modal Lainnya	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	29.027.750	69.579.000	(58,28)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	-
Jumlah Belanja Modal	29.027.750	69.579.000	(58,28)

*Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp29.027.750*

B.4.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp29.027.750 mengalami penurunan sebesar 58,28 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp69.579.000. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pagu Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar 58,39% dibandingkan pagu Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022. Adapun perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun) %
LCD Projector/Infocus	0	7.704.000	(100,00)
Video Conference	0	13.287.000	(100,00)
Handy Talky (HT)	0	0	#DIV/0!
PC Unit	19.977.750	7.950.000	151,29
Note Book	0	35.725.000	(100,00)
Printer (Peralatan Personal Komputer)	4.295.000	4.913.000	(12,58)
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4.755.000	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	29.027.750	69.579.000	(58,28)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Modal	29.027.750	69.579.000	(58,28)

Aset Lancar
Rp26.499.170

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp26.499.170 dan Rp19.355.340. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Satker Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang di rekening BRI	0	0
Uang tunai di brankas	0	0
Yang sudah bentuk kuitansi	0	0
Jumlah	0	0

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang di rekening bank	0	0
Uang tunai di brankas	0	0
Jumlah	0	0

Kas Lainnya dan Setara Kas
Rp0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan
Rp26.499.170

C.1.4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp26.499.170 dan Rp19.355.340 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022
Barang Konsumsi	17.496.700	10.352.870
Amunisi	9.002.470	9.002.470
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Pita Cukai, Materai, dan Leges	0	0
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah	26.499.170	19.355.340

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap
Rp135.650.027

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp135.650.027 dan Rp243.130.021.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman berupa Peralatan dan Mesin.

Peralatan dan Mesin
Rp1.662.252.117

C.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.662.252.117 dan Rp1.633.224.367.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 1 Januari 2023	1.633.224.367
Mutasi tambah :	
Pembelian	29.027.750
Hibah	0
Transfer Masuk	0
Reklasifikasi Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang :	0
Penghentian aset dari penggunaan	0
Penghapusan	0
Saldo per 31 Desember 2023	1.662.252.117
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(1.526.602.090)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	135.650.027

Mutasi tambah peralatan dan mesin antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pembelian komputer unit berupa PC (2 unit) senilai Rp19.977.750.
2. Pembelian peralatan komputer berupa *printer* (1 unit) senilai Rp4.295.000.
3. Pembelian peralatan komputer berupa *scanner* (1 unit) senilai Rp4.755.000.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp1.526.602.090

C.2.2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.526.602.090 dan Rp1.390.094.346.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.662.252.117	(1.526.602.090)	135.650.027
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		1.662.252.117	(1.526.602.090)	135.650.027

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Kewajiban Jangka
Pendek Rp8.943.557

C.3. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp8.943.557 dan Rp8.459.071.

Uang Muka dari
KPPN Rp0

C.3.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp8.943.557

C.3.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp8.943.557 dan Rp8.459.071. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera

diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja barang yang masih harus dibayar	8.943.557
2	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	0
3	Potongan pajak yang belum disetor	0
4	Utang kepada Pihak Ketiga lainnya	0
Total		8.943.557

Adapun rincian belanja barang yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar TA 2023

(dalam rupiah)

No	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Jumlah
1	Tagihan langganan listrik Bulan Desember 2023	1.984.152
2	Tagihan langganan telepon Bulan Desember 2023	52.505
3	Tagihan langganan air Bulan Desember 2023	366.500
4	Tagihan langganan internet (Indihome) Bulan Desember 2023	990.400
5	Tagihan langganan internet (Gmedia) Bulan Desember 2023	5.550.000
Total		8.943.557

Ekuitas

Rp153.205.640

C.4. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp153.205.640 dan Rp254.026.290. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
PNBP
Rp61.770.000

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2021 adalah sebesar Rp61.770.000 dan Rp14.210.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa Lainnya	61.770.000	14.210.000	334,69
Pendapatan Lain-lain	0	0	-
Jumlah	61.770.000	14.210.000	334,69

Pendapatan akrual berasal dari Pendapatan Jasa Lainnya yang berasal dari layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN) bagi Masyarakat Umum di Luar Layanan Rehabilitasi. Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 334,69 persen dibandingkan TA 2022 karena meningkatnya minat masyarakat yang mengakses layanan di Klinik Sembada Bersinar Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman untuk keperluan melamar pekerjaan sehubungan dengan adanya penerimaan CPNS dan PPPK. Selain itu juga terdapat penerimaan siswa pada sekolah dan mahasiswa pada perguruan tinggi yang menyaratkan SKHPN. Klinik Sembada Bersinar Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman kini lebih dikenal oleh masyarakat dibandingkan pada saat awal klinik beroperasi. Di samping itu, pada TA 2022 terdapat penundaan pengajuan revisi target PNBPN oleh Eselon I dalam waktu yang relatif lama sehingga menghambat pelayanan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman kepada masyarakat yang membutuhkan SKHPN, mengingat jumlah *drug abuse test kit* yang dimiliki terbatas dan *stock* telah habis.

Beban
Persediaan
Rp88.878.170

D.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp88.878.170 dan Rp75.381.650. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	88.878.170	75.381.650	17,90
Beban Persediaan Amunisi	0	0	#DIV/0!
Jumlah Beban	88.878.170	75.381.650	17,90

*Beban Barang
dan Jasa
Rp1.269.578.842*

D.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.269.578.842 dan Rp1.125.064.171. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena status pandemi Covid-19 telah dicabut oleh pemerintah pada tahun 2023 sehingga sudah tidak ada lagi pembatasan terhadap penyelenggaraan kegiatan sosial. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Hal tersebut mengakibatkan sebagian besar beban-beban meningkat. Selain itu, pada TA 2023 terdapat *upgrade* kecepatan internet sehingga beban langganan daya dan jasa lainnya meningkat secara signifikan. Walaupun sebagian besar Beban Barang dan Jasa mengalami kenaikan, terdapat beban pengiriman surat dinas pos pusat, beban barang non operasional lainnya, dan beban langganan telepon yang mengalami penurunan. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	555.753.489	519.961.056	6,88
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	152.000	209.000	(27,27)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	113.208.000	111.974.000	1,10
Beban Barang Operasional Lainnya	49.000.000	0	#DIV/0!
Beban Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19	0	21.380.000	(100,00)
Beban Bahan	123.969.700	92.195.400	34,46
Beban Honor Output Kegiatan	7.350.000	6.650.000	10,53
Beban Barang Non Operasional Lainnya	41.495.800	42.722.500	(2,87)
Beban Langganan Listrik	24.751.078	20.334.800	21,72
Beban Langganan Telepon	2.040.725	3.072.101	(33,57)
Beban Langganan Air	4.007.250	3.403.750	17,73
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	78.593.800	45.371.064	73,22
Beban Sewa	88.560.000	88.400.000	0,18
Beban Jasa Profesi	90.065.000	87.900.000	2,46
Beban Jasa Lainnya	90.632.000	81.490.500	11,22
Jumlah	1.269.578.842	1.125.064.171	12,85

D.4. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp151.519.253*

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp151.519.253 dan Rp152.482.418. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2022, tetapi tidak signifikan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	36.624.500	29.995.500	22,10
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	114.894.753	122.486.918	(-6,20)
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	-
Jumlah	151.519.253	152.482.418	(-0,63)

Beban
Perjalanan Dinas
Rp288.585.000

D.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp242.665.041 dan Rp242.665.041. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh meningkatnya frekuensi perjalanan dinas pegawai untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan *stakeholder* terkait serta menghadiri rapat/pertemuan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	93.085.000	46.765.041	99,05
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	63.750.000	64.800.000	(1,62)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	131.750.000	131.100.000	0,50
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	-
Jumlah	288.585.000	242.665.041	18,92

Beban Barang
untuk
Diserahkan
Kepada
Masyarakat Rp0

D.6. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	-
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	49.500	(100,00)
Jumlah	0	49.500	(100,00)

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp136.507.744

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp136.507.744 dan Rp193.306.751. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	136.507.744	193.306.751	(29,38)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	0	0	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	0	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	-
Jumlah Penyusutan	136.507.744	193.306.751	(29,38)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	0	0	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0	0	-
Jumlah Amortisasi	0	0	-
Jumlah Beban	136.507.744	193.306.751	(29,38)

Kegiatan Non
Operasional Rp0

D.8. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik (Turun) %
Penjualan Alat Kantor	0	4.100.000	-
Beban Pelepasan Aset	0	0	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang TA. Yang Lalu	0	0	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	4.100.000	-

Kegiatan Non Operasional pada Satker Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2022 berupa penjualan peralatan dan mesin karena adanya penghapusan BMN dengan kondisi rusak berat.

*Pos Luar Biasa
Nihil*

D.9. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2022.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp254.026.290*

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp254.026.290 dan Rp387.332.109.

*Defisit LO
Rp1.873.299.009*

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah defisit sebesar Rp1.873.299.009 dan Rp1.770.590.031. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi
Rp0*

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0.

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp0*

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir. Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Nilai Persediaan
Rp0*

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Tidak terdapat koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022.

*Selisih Revaluasi Aset
Rp0*

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
Rp0*

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Lain-lain
Rp0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang.

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Transaksi Antar Entitas
Rp1.772.478.359

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.772.478.359 dan Rp1.637.284.212.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas TA 2023

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	61.770.000
Ditagihkan ke Entitas Lain	(1.834.248.359)
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Jumlah	(1.772.478.359)

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp61.770.000 sedangkan DKEL sebesar Rp1.834.248.359.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Tidak terdapat Transfer Masuk/Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ekuitas Akhir
Rp153.205.640

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp153.205.640 dan Rp254.026.290.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal Neraca.

F.2 Pengungkapan Lain-lain

1. Keberadaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota merupakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana menyebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional memiliki perwakilan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota merupakan instansi vertikal. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi.

3. Rekening pemerintah yang digunakan

Rekening Bendahara Pengeluaran

Nomor Rekening (VA) : 650900402561000
Nama Rekening : BPG 030 BNNK SLEMAN
Nama Bank : BRI KCP Sleman
Izin Pembukaan Rekening : S-1791/WPB.12/KP.03/
2020 tanggal 27 Juli 2020

Rekening Bendahara Penerimaan

Nomor Rekening : 1370021952169
Nama Rekening : BPN 030 BNNK SLEMAN
Nama Bank : Bank Mandiri KC
Yogyakarta Sudirman
Izin Pembukaan Rekening : 100524/030 tanggal 15
Maret 2023

4. Pejabat pengelola keuangan
Kuasa Pengguna Anggaran : Siti Alfiah
Pejabat Pembuat Komitmen : Denie Ruth Unarapal
Pejabat Penandatangan SPM : Wasisno
Bendahara Pengeluaran : Intan Pratiwi
Bendahara Penerimaan : Kabul Budi Dwicahyo